



Dewan Minta Penyesuaian Tarif Air PAM Jaya Ditunda

JAKARTA (Poskota) - DPRD Jakarta meminta PAM Jaya menunda penyesuaian tarif air yang rencananya berlaku mulai 1 Januari 2025. Pasalnya kebijakan tersebut dinilai tidak tepat lantaran belum dibarengi dengan kualitas pelayanan yang baik untuk warga.

Hal tersebut diungkapkan Tri Waluyo, anggota Komisi C DPRD Jakarta, yang mengaku telah meninjau langsung warga yang mengalami pelayanan buruk dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

“Saya sudah datang dan melihat langsung air yang diterima warga di beberapa wilayah Jakarta Utara. Keruh dan berbau,” tegas anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jakarta itu kepada Poskota, Kamis (19/12).

Lebih lanjut, Tri mengaku peninjauan dilakukan setelah membaca berita Poskota edisi Kamis (19/12) yang berjudul ‘Terpaksa Manfaatkan Air Keruh dan Berbau.’ “Ternyata setelah saya datang memang hal itu benar dialami warga,” kata Tri.

Terkait hal ini, setelah peninjauan tersebut, Tri mengaku langsung menindaklanjutinya dengan menghubungi Dirut PAM Jaya, Arief Nasrudin. “Pak dirut mengatakan bahwa sedang dilakukan pengurusan air, karena air dari Waduk Jatiluhur mau dialirkan. Sehingga berpengaruh pada kualitas air yang diterima warga,” ungkap Tri.

Lebih lanjut Tri mengatakan bahwa Komisi C yang menaungi BUMD memang tengah menggodok penyesuaian tarif air. Namun melihat fakta di lapangan belum baiknya pelayanan air kepada warga, ia pun meminta rencana tersebut untuk ditunda.

“Fraksi PKB dalam rapat bersama lalu telah meminta PAM Jaya untuk menunda penyesuaian tarif selama

pelayanan belum diperbaiki,” ucap Tri yang juga tokoh masyarakat Jakarta Utara ini.

Menurutnya meski penyesuaian tarif air telah tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) No.730 Tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya, namun seyogyanya ditunda. “Dalam rapat itu kami juga mengultimatum PAM Jaya bahwa di tahun 2027, air PAM sudah bisa diminum langsung oleh warga di Jakarta Utara,” ujar Tri.

Pelanggan Mapan

Hal yang sama juga disampaikan anggota DPRD Jakarta, Ir. Tubana Zoelkifli. Dia menekankan, walaupun ingin menaikkan tarif, maka harus ditujukan pada pelanggan yang mapan.

“Kita minta PAM Jaya membuat supaya kenaikan itu hanya untuk pelanggan-pelanggan yang memang mampu. Jadi di sini ada kelas-kelasnya kan ya, ada kelas 1, kelas 2, segala macam,” kata Taufik.

Dia juga meminta agar PAM Jaya segera merampungkan perbaikan pipa yang ditargetkan rampung 100 persen pada 2030 mendatang. PAM Jaya, kata dia, harus menyediakan air dengan kualitas bisa diminum secara langsung dari keran. “Kualitas airnya itu menjadi benar-benar air yang

bisa diminum langsung dari keran,” tegasnya.

Harus Penuhi Tiga Aspek

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menegaskan PAM Jaya harus dapat memberikan jaminan pelayanan yang jauh lebih baik jika ingin menaikkan tarif. Selain itu PAM Jaya juga tetap harus memperhatikan hak-hak konsumen dan wajib mengkaji tiga aspek penting secara mendalam.

Tiga aspek tersebut ialah kebutuhan dasar, daya beli masyarakat, dan kemampuan membayar. “Karena bagaimanapun air adalah kebutuhan dasar. Jadi dalam penetapan harga tidak bisa seenaknya. PAM harus memperhatikan aspek daya beli atau kemampuan membayar dan aspek kemauan membayar,” katanya.

Namun ketika tarif resmi naik, Tulus mengingatkan, PAM Jaya harus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan pada penggunaannya secara terukur, baik pasokan maupun kualitas air. Juga penanganan pengaduan konsumen yang cepat dan menggunakan beragam akses.

Tidak hanya itu, PAM Jaya wajib meningkatkan keandalan dan inovasi pelayanan. Seperti memperbanyak reservoir komunal yakni penampungan air dekat permukiman.

Menurut dia, keberadaan reservoir komunal sangat penting untuk mengatasi masih tingginya kasus kehilangan air yang disebabkan kebocoran pipa.

“Jika PAM Jaya tak mampu memberikan jaminan peningkatan pelayanan, maka kenaikan tarif menjadi kebijakan yang tidak adil, tidak bijak. Apalagi tarif PAM Jaya sudah mencapai level full cost recovery,” ucap Tulus.

Diberitakan Poskota, sejumlah warga RT 02 RW 12 Lagoa dan RT 05 RW 05 Cilincing mengeluhkan air PAM Jaya yang mengalir ke rumah mereka keruh dan berbau. “Bahkan warga terpaksa memanfaatkan air tidak layak konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari meski berisiko terhadap kesehatan. Kondisi ini sudah warga alami selama belasan tahun.

Selama itu, warga mengaku telah merugi secara finansial. Sebab, mereka harus tetap menyetorkan uang bulanan sebagai tarif yang ditetapkan PAM Jaya, meski air yang mereka dapatkan tidak layak konsumsi.

Warga pun mau tak mau harus merogoh uang tambahan untuk membeli air bersih untuk keperluan memasak. Tak tanggung-tanggung, nominal yang warga keluarkan bisa mencapai ratusan ribu rupiah. (ruh/pan/man)